

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indra, pengenalan pola, dan perhatian.¹

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian memengaruhi seseorang dalam berperilaku.²

Menurut Rajecki, terdapat faktor-faktor yang harus diketahui untuk membentuk opini yang dibentuk dari persepsi dan sikap, hal ini untuk membedakan persepsi dan opini. Faktor-faktor ini dikenal dengan istilah *ABCs of attitude*:

A. Komponen A: *Affect* (Perasaan atau emosi) komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih,

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 51

² Slameto, *Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 102

dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen afektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk hasilkan penilaian, yaitu: “baik atau buruk”.

B. Komponen B: *Behavior* atau konatif (tingkah laku) komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menerima, menolak, dan lain sebagainya. Jadi merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif untuk melakukan “tindakan atau berperilaku” atas suatu reaksi yang sedang dihadapinya.

C. Komponen C: *Cognition* (pengertian atau nalar) komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya. Artinya kognitif tersebut merupakan

aspek kemampuan intelektualitas seseorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.³

Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor-faktor personal yang memengaruhi persepsi adalah:

A. Pengalaman

Apa yang dialami oleh perseptor. Pengalaman ini biasa diperoleh melalui berbagai jalan, diantaranya melalui proses belajar, selain melalui proses rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk maupun baik.

B. Motivasi

Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar, seseorang mau melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, oleh karena setiap orang mempunyai kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

C. Pengetahuan

Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan persepsi. Persepsi ini bisa diukur melalui tingkat pendidikan

³ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 68-70

tinggi dengan sendirinya tingkat pengetahuannya pun menjadi luas.⁴

Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan persepsi seseorang, antara lain:

A. Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu dialami di dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi, yang indah, tentram, akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi seseorang yang buta warna.

B. Keluarga

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarganya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

C. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam memengaruhi

⁴ Rakhmad Jalaludin, *Persepsi dalam Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 42.

sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan dunia ini.⁵

Ada beberapa subproses dalam persepsi ini, dan yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif. Subproses pertama yang dianggap penting ialah stimulus, atau situasi yang hadir. Mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu stimulus. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. Subproses selanjutnya adalah registrasi, interpretasi, dan umpan balik. Dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh, kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan memengaruhi persepsi.

Dalam hal ini seseorang mendengar atau melihat informasi terkirim kepadanya. Mulailah ia mendaftarkan semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya. Setelah terdaftarnya semua informasi yang sampai kepada seseorang subproses berikut yang bekerja ialah interpretasi. Interpretasi merupakan aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (*learning*), motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan

⁵ *Ibid.*

kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap sesuatu informasi yang sama, akan berbeda antar satu orang dengan orang lain. Disinilah letak sumber perbedaan pertama dari persepsi, dan itulah sebabnya mengapa interpretasi merupakan subproses yang penting. Subproses terakhir adalah umpan balik (*feedback*). Subproses ini dapat memengaruhi seseorang.⁶

Adapun prinsip-prinsip pemilihan persepsi berdasarkan faktor-faktor perhatian dari luar juga dapat memengaruhi proses seleksi persepsi yaitu:

A. Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami (*to be perceived*).

B. Keberlawanan atau kontras

Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimuli luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya atau yang sama sekali diluar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian.

⁶ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hal. 145-146.

C. Pengulangan (*Repetition*)

Dalam prinsip ini dikemukakan bahwa dtimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekali dilihat.

D. Baru dan Familiar

Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian. Objek atau peristiwa baru dalam tatanan yang sudah dikenal, atau objek atau peristiwa yang sudah dikenal dalam tatanan yang baru akan menarik perhatian pengamat.⁷

2. Konsep Politik

Pada umumnya politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Menurut Peter Merkl, “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.”, “Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.” Singkatnya adalah politik adalah perebutan kuasa, tahta dan harta.

⁷ *Ibid.*, hal. 149-154.

Menurut Rod Hague, “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Menurut Andrew Hailwood, “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.⁸

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir, ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 15-16.

yang dianggap penting. Kelima cara pandang dalam melihat politik tersebut dijelaskan sebagai:

A. Klasik

Menurut Aristoteles, pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Filsuf ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan publik), dengan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat (swasta).

Aristoteles menyebutkan manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam *polis*. Hanya dalam *polis* itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena di sana urusan-urusan yang berkenaan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatkan, dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. Di luar *polis* manusia dipandang sebagai makhluk yang berderajat dibawah manusia seperti Dewa atau Tuhan.

Pandangan klasik menekankan pada “apa yang seharusnya” dicapai demi kebaikan bersama seluruh warga negara *polis* dan

“dengan cara apa sebaiknya” tujuan-tujuan itu dicapai. Dengan kata lain, pandangan klasik lebih menekankan aspek filosofis (idea dan etik) daripada aspek politik.

B. Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu

Negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Oleh karena itu, politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk memengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antarkelompok di dalam suatu negara. Menurutnya, negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkret, dan dia membatasi pengertian negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk melepaskan ketaatan.

C. Kekuasaan

Pandangan ketiga melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan

adalah kemampuan pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang memengaruhi dan yang lain mematuhi. Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan di manapun kekuasaan itu ditemukan.

Robson merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan ini. Dirumuskan, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkung dan hasil-hasil kekuasaan.

D. Fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Menyimpang dari pandangan kelembagaan di atas, dewasa ini para ilmuwan politik memandang politik dari kaca mata fungsional. Menurut

mereka, politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum.

Di antara ilmuwan politik yang menggunakan kacamata fungsional dalam mempelajari gejala politik ialah David Easton dan Harold Lasswell. Easton merumuskan politik sebagai *the authoritative of values for society*, atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat.

Sementara menurut Lasswell, proses politik sebagai masalah *who gets what, when, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. “Mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. “Bagaimana” berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Nilai-nilai disini adalah hal-hal yang diinginkan, dikejar oleh manusia, dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya.

Fungsionalisme cenderung melihat nilai-nilai secara instrumental bukan sebagai tujuan seperti yang ditekankan pandangan klasik. Bagi fungsionalisme, nilai-nilai sebagai tujuan bersifat sangat relatif karena berbeda dari satu tempat dan waktu ke tempat dan waktu yang lain. Dalam hal ini, dilupakan politik

tidak pernah bersifat netral, bahwa politik secara ideal seharusnya menyangkut kebaikan bersama.

E. Konflik

Menurut pandangan ini, kegiatan untuk memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain merupakan upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, sering terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba-hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses

politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses politik.

Dari segi metodologi, kelima pandangan itu acap kali dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yakni tradisional dan behavioralisme. Ilmu politik tradisional memandang gejala politik dari segi normatif dan menganggap tugas ilmu politik untuk memahami dan memberikan gejala politik, bukan menjelaskan apalagi memperkirakan apa yang akan terjadi. Ilmu politik tradisional melihat politik sebagai perwujudan tujuan masyarakat-negara. Yang termasuk ilmu politik tradisional dalam hal ini berupa pandangan klasik dan kelembagaan. Behavioralisme memandang politik dari segi apa adanya yang berupaya menjelaskan mengapa gejala politik tertentu terjadi seperti itu, kalau mungkin membicarakan juga gejala politik apa yang akan terjadi. Behavioralisme melihat politik sebagai kegiatan (perilaku), yang berawal dengan asumsi terdapat keajegan atau pola dalam perilaku manusia. Oleh karena itu, politik sebagai pola perilaku dapat dijelaskan dan diperkirakan. Yang termasuk behavioralisme dalam hal ini yang berupa kekuasaan, konflik dan fungsionalisme.⁹

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal 2-11.

3. Teori Kekuatan Politik

Kekuatan politik adalah kemampuan suatu kelompok dalam memengaruhi proses pembuatan dan perumusan keputusan-keputusan politik yang menyangkut masyarakat umum. Kemampuan memengaruhi dilakukan kelompok dengan menggunakan sumber-sumber kekuasaan dan akses yang dimiliki, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah akan menguntungkan mereka. Suatu kelompok akan memengaruhi keputusan-keputusan politik, apabila keputusan-keputusan yang dibuat menyangkut kepentingan mereka, sehingga apapun konsekuensinya akan dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut dengan berbagai upaya. Upaya-upaya yang dilakukan biasanya dengan mengerahkan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki dan disalurkan melalui saluran-saluran yang tersedia.¹⁰

Kekuatan politik kontemporer menjelma menjadi beberapa bentuk yang lazim dikenal dalam kehidupan masyarakat modern, yakni partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, militer, pemuda dan mahasiswa, organisasi buruh, dan sebagainya. Kekuatan politik tersebut dapat menampilkan perannya sendiri tanpa harus melibatkan kekuatan politik lain. Namun, dari segi lain kekuatan politik juga dapat menjalin perannya sendiri tanpa harus melibatkan kekuatan politik lain. Namun, dari segi lain kekuatan

¹⁰ Haniah Hanafie, *Kekuatan-Kekuatan Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 15.

politik juga dapat menjalin kerjasama dengan kekuatan lain untuk mewujudkan kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Interaksi dalam bentuk kerjasama ini dapat terwujud karena adanya agenda publik yang harus mereka perjuangkan.¹¹

Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (*interest group*) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.¹²

Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok penekan (*pressure group*). Kelompok kepentingan, sesuai dengan namanya memusatkan perhatian kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Jadi, ia lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat pemerintah. Kelompok

¹¹ Asrinaldi, *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2014), hal. 178.

¹² Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, hal. 140

penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk suatu tujuan khusus setelah itu bubar, dan secara khusus pula berusaha memengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka. Dengan demikian, perbedaannya lebih pada cara dan sasaran.¹³

Kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Organisasi internal lebih longgar dibanding dengan partai politik. Mereka juga tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen karena menganggap badan itu telah berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik. Mereka cenderung memfokuskan diri pada satu masalah tertentu saja. Keanggotaannya terutama terdiri atas golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas serta terpinggirkan, seperti kaum buruh di Eropa Barat dan golongan Afrika-Amerika di Amerika Serikat. Tujuan utama adalah memperbaiki nasib dari masing-masing golongan, terutama keadaan ekonominya.¹⁴

Sepanjang sejarah, kelompok kepentingan selalu ada beriringan dengan keberadaan negara atau pemerintahan yang ada. Bahkan, dalam sistem politik kerajaan sekalipun, kelompok kepentingan juga ada. Meski dalam kapasitas dan intensitas kegiatan yang minimalis, akibat represi kerajaan yang cenderung despotik.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 383-384

Kelompok kepentingan dalam sistem negara yang menganut demokrasi, seperti Indonesia, mendapatkan ruang yang cukup luas. Namun sayangnya, ruang ini kerap kali tidak digunakan secara efektif dan maksimal akibat benturan kepentingan pada kelompok itu sendiri. Alasannya sebagai berikut:

1. Kelompok Anomik

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk di antara unsur - unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering tumpang-tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik, dan lain-lain. Sehingga, apa yang dianggap sebagai kelompok anomik ini mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisasi yang menggunakan cara-cara nonkonvensional atau kekerasan

2. Kelompok non-asosiasional

Seperti kelompok anomik, kelompok ini jarang sekali yang terorganisasi secara rapi. Selain itu, kegiatan-kegiatan nya juga tidak begitu intens, hanya kadang kala. Wujud dari kelompok ini adalah kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadang kala melalui individu-individu, kepala keluarga, atau

pemimpin agama. Secara teoretis, kegiatan kelompok non-
asosiasional ini terutama merupakan ciri masyarakat belum
maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga
aristokrat mendominasi kehidupan politik, dan kelompok
kepentingan yang terorganisasi dan fokus tidak ada atau masih
lemah.

3. Kelompok institusional

Kelompok ini sifatnya formal dan memiliki fungsi-fungsi politik
atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Oleh karena
itu, organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis,
badan legislatif, militer, birokrasi, dan ormas-ormas keagamaan
sering kali mendukung kelompok ini atau memiliki anggota-
anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan
lobi. Sebagai kelompok yang formal seperti itu, kelompok ini
bisa menyatakan kepentingan sendiri maupun mewakili
kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.
Jika kelompok institusional ini sangat berpengaruh, maka
biasanya akibat dari basis organisasinya yang kuat.

4. Kelompok asosiasional (Lembaga-lembaga swadaya masyarakat)

Kelompok asosiasional ini meliputi buruh, kamar dagang, atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisasi oleh kelompok-kelompok agama, dan lain-lain. Secara khas, kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staf profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.¹⁵

Organisasi Non Pemerintah (Ornop)

Organisasi non pemerintah (Ornop) dikenal juga dengan sebutan NGO (*Non Governmental Organization*), dan oleh sebagian orang dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ornop menjadi fenomenal di dunia politik di Indonesia karena memiliki posisi tawar-menawar yang kuat terhadap pemerintah. Sejak reformasi, Ornop menjadi kekuatan sosial politik baru. Menurut Gaffar, Keberadaan Ornop merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi. Tanpa ada Ornop, maka pemerintah tidak

¹⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 43-44.

dapat melaksanakan tugasnya karena pemerintah memiliki banyak keterbatasan¹⁶.

Ornop lahir sebagai perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang peduli pada persoalan-persoalan yang muncul di negaranya, baik persoalan dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan politik. Ornop adalah buah kecerdasan kelompok tercerahkan. Kelompok yang biasanya berasal dari kalangan menengah. Kehadiran Ornop adalah sebuah keniscayaan sosial, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberdayakan, membangun, dan melayani masyarakat. Tidak jarang karena tujuan Ornop ini untuk memberdayakan dan memperkuat posisi masyarakat, maka Ornop ini seringkali mendapat tempat di hati masyarakat kalangan bawah (*grass roots*).¹⁷

Menurut Afan Gaffar, banyak peranan yang dapat dimainkan oleh Ornop, terutama menguatkan kedudukan masyarakat. Misalnya, dengan mendukung dan memberdayakan masyarakat, terutama pada tingkat akar rumput, agar pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Ornop juga dapat meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional

¹⁶ *Ibid.*, hal. 229.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 230

lainnya. Selain itu, Ornop dapat juga mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan rancangan pemerintah.¹⁸

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan penelitian terdahulu yang mana relevan dengan pembahasan penelitian mengenai Persepsi Politik Komunitas *Bikers* Subuhan terhadap Kekuatan Politik Islam dalam Pilpres 2019. Hasil temuan ini disajikan dalam tabel matriks berikut:

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anna Dameria Turnip (2015) Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan	Dalam penelitian ini dibahas mengenai persepsi masyarakat Desa Branti terhadap peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Desa	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas daripada persepsi politiknya juga momentum	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu disini mengambil fokus peranan partai

¹⁸ *Ibid.*

	<p>Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015.</p>	<p>Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini dilihat persepsi masyarakatnya melalui hasil rekapitulasi data yang mempertunjukkan pemahaman, harapan, dan tanggapan baik masyarakatnya terhadap pelaksanaan fungsi partai politik dalam sosialisasi calon kepala daerah sampai mendidik masyarakat untuk memilih calon</p>	<p>pemilihan umum yang dijadikan fenomena penelitian. Penulis disini meneliti persepsi politik Komunitas <i>Bikers</i> Subuhan Tasikmalaya terhadap kekuatan politik Islam dengan konsep persepsi dan politik serta didukung oleh teori kekuatan politik.</p>	<p>politik dalam pemilihan kepala daerah di Desa Branti. Sedangkan penulis disini fokusnya adalah kekuatan politik Islam dalam kelompok pendukung pasangan calon 02 di Pilpres 2019.</p>
--	---	--	---	--

		yang dapat dipercaya dan mengatasi konflik dalam pemilihan kepala daerahnya.		
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran



Maksud dari kerangka pemikiran ini adalah penulis menekankan Komunitas *Bikers* Subuhan Tasikmalaya mengenai

persepsi politiknya terhadap kekuatan politik Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. Persepsi Politik disini menekankan terhadap kekuatan politik Islam yang cukup besar dalam Pemilihan Presiden 2019, dimana Islam yang diwakilkan oleh kelompok-kelompok agama yang pada saat Pilpres 2019 bersuara, cukup andil dalam memengaruhi suara untuk salah satu calon yang didukungnya. Calon 02 yang mengayomi kelompok Islam sehingga menimbulkan kekuatan kelompok Islam yang cukup ‘vokal’ dalam pilpres 2019 cukup menjadi perhatian masyarakat. Dengan menggunakan teori kekuatan politik, penulis disini ingin mengetahui persepsi politik daripada Komunitas *Bikers* Subuhan Tasikmalaya terhadap kekuatan politik Islam dalam Pilpres 2019.